



CALK TAHUNAN AUDITED TA 2024

Stasiun PSDKP Pontianak

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec.
Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kubu Raya, 5 Mei 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Sunarto, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19850616 200701 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
JL Dr. Moh Hatta, Sui Rengas, Kec. Sui Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalbar
TELEPON (0561) 773321, FAXIMILE (0561) 773321

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kubu Raya, 5 Mei 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19850616 200701 1 003

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Pontianak Audited Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.206.796.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp40.969.821.578 atau mencapai 98,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp41.626.470.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.846.119.716 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp797.126.246; Aset Tetap (neto) sebesar Rp38.988.115.470; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.124.607.360 dan Rp39.721.512.356.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp320, sedangkan jumlah beban adalah sebesar (Rp42.178.771.007) sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp42.178.770.687. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp48.230.568) dan sebesar (Rp42.227.001.255) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp42.227.001.255).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp41.153.798.446 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(42.227.001.255) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0, Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 serta koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai (Rp169.247.805), Koreksi lain – lain Rp19.438 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp40.963.943.532 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp39.721.512.356.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	13,206,796	0.00	9,968,473
JUMLAH PENDAPATAN		-	13,206,796	0.00	9,968,473
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12,097,900,000	12,076,248,406	99.82	10,305,312,697
Belanja Barang	B.4	27,044,190,000	26,412,641,839	97.66	35,145,919,871
Belanja Modal	B.5	2,484,380,000	2,480,931,333	99.86	290,830,101
JUMLAH BELANJA		41,626,470,000	40,969,821,578	98.42	45,742,062,669

II. NERACA

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	3,887,600
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(19,438)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	797,126,246	790,800,317
Jumlah Aset Lancar		797,126,246	794,668,479
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11,836,746,000	11,836,746,000
Peralatan dan Mesin	C.15	60,109,804,498	65,758,612,092
Gedung dan Bangunan	C.16	14,402,001,836	12,472,114,103
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	22,153,264,709	22,153,264,709
Aset Tetap Lainnya	C.18	647,298,080	647,298,080
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	80,355,300
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(70,160,999,653)	(72,532,616,530)
Jumlah Aset Tetap		38,988,115,470	40,415,773,754
ASET LAINNYA			
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.21	1,060,878,000	187,851,098
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		1,060,878,000	187,851,098
JUMLAH ASET		40,846,119,716	41,398,293,331
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1,124,607,360	244,494,885
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,124,607,360	244,494,885
JUMLAH KEWAJIBAN		1,124,607,360	244,494,885
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	39,721,512,356	41,153,798,446
JUMLAH EKUITAS DANA		39,721,512,356	41,153,798,446
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40,846,119,716	41,398,293,331

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	320	-
JUMLAH PENDAPATAN		320	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12,100,142,192	10,303,462,697
Beban Persediaan	D.3	220,149,822	359,214,011
Beban Barang dan Jasa	D.4	16,125,720,001	28,811,760,351
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	6,522,392,242	3,621,170,232
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3,488,434,132	2,569,508,089
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3,721,932,618	3,765,433,877
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	9,250
JUMLAH BEBAN		42,178,771,007	49,430,558,507
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(42,178,770,687)	(49,430,558,507)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		24,737,944	19,067,133
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		9,318,828	5,103,373
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		48	4,865,100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		32,811,500	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(48,230,568)	(9,098,660)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(42,227,001,255)	(49,439,657,167)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(42,227,001,255)	(49,439,657,167)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	41,153,798,446	44,614,211,942
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(42,227,001,255)	(49,439,657,167)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(169,228,367)	487,494,475
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN	E.3.4	-	120,169,146
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	(169,247,805)	365,297,917
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	19,438	2,027,412
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	40,963,943,532	45,491,749,196
EKUITAS AKHIR	E.5	39,721,512,356	41,153,798,446

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di amanahkan adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Pontianak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”**

Sedangkan Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap

kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab

- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024 salah satu yang diamanatkan adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Disamping itu, terdapat pula arahan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
2. Pembinaan (penataan) nelayan lokal

UPT Stasiun PSDKP Pontianak melalui SK Keputusan Direktur Jenderal PSDKP No.10/KEP-DJPSDKP/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Dirjen PSDKP di UPT terdapat 2 unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. *Speedboat* yang terdapat pada Stasiun PSDKP Pontianak berjumlah 5 unit yaitu Napoleon 003, Napoleon 037, Napoleon 038, TB. 01, dan *Searider*. Pembelian BBM dengan menggunakan voucher dilakukan untuk Napoleon 037 dan *searider* yang diambil di SPBU yang berada di Pontianak dan Napoleon 038 yang dapat diambil di SPBU yang berada di Sambas.

Sampai dengan akhir TA 2024 terdapat barang bukti berupa kapal ikan asing sebanyak 22 kapal yang terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak dengan rincian:

- 3 kapal lelang yang masih belum di ambil oleh pemenang

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- 1 kapal yang dihibahkan ke UNDIP
- 2 kapal yang dihibahkan ke BPRSDM
- 4 kapal yang dihibahkan ke KKP, dan
- 12 kapal yang dititipkan ke kejaksaan

Jumlah pegawai negeri sipil Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 81 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 22 orang, Golongan III sebanyak 57 orang, dan Golongan IV sebanyak 2 orang. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dialokasikan untuk 81 pegawai dengan rincian pegawai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	Pegawai Kontrak		PPPK	Jumlah
			PPNPN	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	27	9	13	13	62
	KP. Hiu Macan 01	16	-	-	2	16
	KP. Hiu 11	10	-	-	1	10
2	Wilker PSDKP Sungai Rengas	2	2	-	-	4
3	Wilker PSDKP Mempawah	1	2	-	-	3
4	Wilker PSDKP Entikong	1	2	1	-	4
5	Wilker PSDKP Kapuas Hulu	2	1	1	-	4
6	Satwas SDKP Sambas	5	1	2	1	8
7	Wilker PSDKP Singkawang	1	1	-	-	2
8	Wilker PSDKP Jagoibabang	1	2	-	-	3
9	Wilker PSDKP Selakau	1	-	-	1	1
10	Wilker PSDKP Sajingan	1	1	-	-	2
11	Satwas SDKP Kayong Utara	4	2	-	-	6
12	Wilker PSDKP Ketapang	4	-	-	-	4
13	Satwas SDKP Kotawaringin Barat	3	1	-	-	4
14	Wilker PSDKP Seruyan	2	-	-	-	2
Total		81	24	17	18	135

Pada anggaran tahun 2024 terdapat kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional yaitu;

- Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan (2350) dengan RO:
 - Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP,
 - Operasi Kapal Pengawas,
 - Operasi Speedboat Pengawas,

- Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun, dan
- Armada Pengawasan SDKP yang dirawat.
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan (2352) dengan RO:
 - Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (2353) dengan RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
Macet	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan

pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak memiliki nomor DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November 2023 dengan nomor digital stamp 2873-4272-0545-5000. Selama Tahun Anggaran 2024, Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 14 (empat belas) kali. Rincian anggaran belanja Stasiun PSDKP Pontianak 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Pendapatan Lain - Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	12,062,553,000	12,097,900,000
Belanja Barang	27,411,282,000	27,044,190,000
Belanja Modal	2,474,635,000	2,484,380,000
Jumlah Belanja	41,948,470,000	41,626,470,000

Pada awal tahun 2024 terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp119.840.000 yang terdiri dari anggaran melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000 (anggaran belanja barang) dan anggaran yang belum dilengkapi Evaluasi Anggaran (Clearance) sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp100.000.000 (anggaran belanja modal).

Rincian Revisi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Revisi ke 1 tanggal 25 Januari 2024 dengan *digital stamp* DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

mempertimbangkan kondisi *geopolitik* global melalui *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000. Anggaran yang diblokir merupakan anggaran belanja barang (52) sebesar Rp1.866.760.000 dan anggaran belanja modal (53) sebesar Rp145.000.000. Total nilai anggaran yang diblokir sebesar Rp2.011.760.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Semula		Menjadi	
		Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)	Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	-	1,878,297,000	-	1,878,297,000
2351	Penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	-	35,000,000	-	35,000,000
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-
2355	Dukungan Manajemen Internal	119,840,000	78,623,000	19,840,000	78,623,000
Total		119,840,000	1,991,920,000	19,840,000	1,991,920,000

- Revisi ke 2 tanggal 7 Februari 2024 dengan Digital Stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
- Revisi ke 3 tanggal 22 April 2024 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:2084-0506-0580-7385 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowerring Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.

- Revisi ke 4 tanggal 1 Mei 2024 yang merupakan revisi DJA dengan DS:2143-7527-3625-8851 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000. Total blokir anggaran yang masih tersisa sebesar Rp1.991.920.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Semula		Menjadi	
		Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)	Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	-	1,878,297,000		1,878,297,000
2351	Penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-		-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	-	35,000,000		35,000,000
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-		-
2355	Dukungan Manajemen Internal	19,840,000	78,623,000	-	78,623,000
Total		19,840,000	1,991,920,000	-	1,991,920,000

- Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2024 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
- Revisi ke 6 tanggal 9 Juli 2024 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena terdapat beberapa

anggaran yang kurang dari realisasi untuk dibayarkan di bulan selanjutnya.

- Revisi ke 7 tanggal 8 Agustus 2024 dengan digital stamp DS:6536-2961-2214-0040 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL berupa Pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000. Pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
- Revisi ke 8 tanggal 4 September 2024 dengan digital stamp DS:8204-3609-4086-0080 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL berupa Pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) sebesar Rp9.991.000 yang dipergunakan untuk pembangunan garasi motor Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp20.000.000, pergeseran anggaran dalam satu RO Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP, pergeseran anggaran dalam satu RO Armada Pengawasan SDKP yang dirawat yang semula dipergunakan untuk repowering Auxiliary Engine KP. HMC 01 menjadi penambahan darurat Kapal Pengawas sebesar Rp184.440.000, pergeseran anggaran antar RO yaitu dari RO unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak (2352.QIC.002) sebesar Rp5.360.000 ke Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (2352.QIC.001) yang dipergunakan untuk kegiatan operasional.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Revisi 9 tanggal 15 Oktober 2024 dengan digital stamp DS:0340-7084-1808-7079 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001), dan pergeseran anggaran belanja pegawai oleh karena terdapat pagu minus di beberapa detil belanja pegawai.
- Revisi 10 tanggal 5 November 2024 dengan digital stamp DS:8145-5650-8193-0350 yang merupakan revisi kewenangan DJA berupa buka blokir anggaran sebesar Rp1.821.777.000 dengan rincian:
 - Operasional kapal pengawas melalui penambahan hari operasi sebanyak 6 hari operasi dengan anggaran sebesar Rp1.258.777.000 (termasuk didalamnya berupa penambahan belanja bahan bakar minyak, uang delegasi, ongkos angkut dan pelumas).
 - Armada yang dirawat sebesar Rp563.000.000 yang akan dipergunakan untuk (pembelian Radar, perbaikan komponen kelistrikan (HCU dan PCU) pada KP. Hiu 11).

Kode	Uraian	Semula		Menjadi	
		Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)	Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	-	1,878,297,000		56,520,000
2351	Penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-		-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	-	35,000,000		35,000,000
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-		-
2355	Dukungan Manajemen Internal		78,623,000	-	78,623,000
	Total	-	1,991,920,000	-	170,143,000

- Revisi 11 tanggal 17 November 2024 dengan digital stamp DS:3906-0485-4297-5240 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPb yang merupakan revisi *selfblocking* pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri sebanyak Rp200.000.000.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Kode	Uraian	Semula		Menjadi	
		Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)	Melebihi RKBMN (Kode 9)	AA (Kode 2)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	-	56,520,000		99,387,000
2351	Penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-		-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	-	35,000,000		40,158,000
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	-	-		57,957,000
2355	Dukungan Manajemen Internal		78,623,000	-	172,641,000
	Total	-	170,143,000	-	370,143,000

- Revisi 12 tanggal 20 November 2024 dengan digital stamp DS:0907-3797-0852-1999 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPb berupa penambahan volume output pada RO Layanan BMN (2355.EBA.956) semula 1 layanan menjadi 4 layanan, dan penambahan anggaran belanja gaji untuk memenuhi pagu minus pada beberapa detil belanja pegawai.
- Revisi 13 tanggal 11 Desember 2024 dengan digital stamp DS:8976-9610-6043-2936 yang merupakan revisi kewenangan DJA berupa volume output beserta anggaran Penanganan Perkara semula 7 kasus menjadi 3 kasus dan pergeseran anggaran antar UPT sebesar Rp322.000.000 yaitu ke UPT Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp272.000.000 berupa anggaran penanganan perkara dan ke UPT Pangkalan PSDKP Batam berupa anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp50.000.000.
- Revisi 14 tanggal 27 Desember 2024 dengan digital stamp DS:8976-9610-6043-2936 berupa pemutakhiran revisi KPA dan pergeseran anggaran belanja gaji pegawai.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja				
Belanja Pegawai	12,062,553,000	12,097,900,000	12,076,248,406	99.82
Belanja Barang	27,411,282,000	27,044,190,000	26,412,641,839	97.66
Belanja Modal	2,474,635,000	2,484,380,000	2,480,931,333	99.86
Jumlah Belanja	41,948,470,000	41,626,470,000	40,969,821,578	98.42

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai Rp19.913.930.000 dan realisasi sebesar Rp6.913.083.285 dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QDD	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	400,000,000	395,082,645	98.77					
2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	400,000,000	395,082,645	98.77	Kelompok Masyarakat	4	4	100.00	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	12,810,403,000	12,730,189,946	99.37					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	11,758,753,000	11,739,543,246	99.84	Operasi	40	40	100.00	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	1,051,650,000	990,646,700	94.20	Operasi	30	30	100.00	
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5,443,927,000	5,420,349,137	99.57					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	5,443,927,000	5,420,349,137	99.57	Unit	7	7	100.00	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	603,000,000	552,293,227	91.59					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	450,000,000	426,437,602	94.76	Lembaga	7	7	100.00	
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	153,000,000	125,855,625	82.26	Lembaga	40	40	100.00	
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	656,600,000	598,261,969	91.12					
2353.QIC.004	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	656,600,000	598,261,969	91.12	Lembaga	100	100	100.00	
TOTAL		19,913,930,000	19,696,176,924	98.91					

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.RBQ	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	1,625,454,498	99.22					
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,633,850,000	1,625,454,498	99.49	Unit	1	1	100	
TOTAL		1,633,850,000	1,625,454,498	99.49					

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.206.796. **Pendapatan** Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp9.968.473, nilai realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

sebesar 32,49%. Hal tersebut disebabkan terdapat nilai lelang dan pengembalian belanja pegawai tahun lalu lebih besar daripada tahun yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9,318,828	-	0.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	5,103,373	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,887,648	4,865,100	0.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	320	-	0.00
Pendapatan Anggaran Lain - lain	-	-	0.00
Jumlah	13,206,796	9,968,473	32.49

Realisasi pendapatan sebesar Rp13.206.796 dengan uraian:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp9.318.828 dengan rincian:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.117.128 dengan NTPN 34D211JNFUN2DG2B dan NTB 447935668768 tanggal 26 Januari 2024 melalui risalah lelang nomor 56/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024.
 - Penjualan alat rumah tangga dan perabot kantor melalui risalah lelang nomor 59/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024 yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2024 dengan NTPN 3515348VVEDUSNPK dan NTB 064567978302 sebesar Rp201.700.
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp320 yang dibayarkan melalui NTPN F48BD55DF96LUUO6 dan NTB 000000296875 tanggal 29 Maret 2024 pada Kapal Pengawas Hiu 11 yang disebabkan adanya munculnya bunga bank pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atau rekening giro

dan pengajuan tanpa jasa giro pada rekening giro tersebut oleh bendahara sedang dalam proses pengajuan.

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) sebesar Rp3.887.648 yang terdiri dari:
 - Melalui SP2D 3308055DF9BQ836I tanggal 22 Januari 2024 dan SPM 00022T/440847/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp18.
 - Melalui SP2D 240421305000662 tanggal 20 Maret 2024 dan SPM 00168T/440847/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp30.
 - Melalui NTPN 5227A48VVEPDR0BQ dan NTB 000000098753 tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp2.037.600.
 - Melalui NTPN 3308055DF9BQ836I dan NTB 000000095085 Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp1.850.000.

Pada TA 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan pemrosesan sanksi administratif, yang disetorkan langsung ke bendahara penerimaan Sekretariat Jenderal PSDKP. Penetapan denda administratif tersebut dilakukan terhadap:

- KM. Herry melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dan mendaratkan ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan dengan jumlah denda administratif sebesar Rp32.175.000
- KM. Bejo Satrio I melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp133.747.200
- KM. Buana Mulya melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha, yaitu telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan yang

tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan tidak mengaktifkan transmitter VMS selama beroperasi di laut dengan jumlah denda administratif sebesar Rp112.497.760.

- KM. Tirta Mangkurat Jaya melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha, yaitu telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan tidak mengaktifkan transmitter VMS selama beroperasi di laut dengan denda administratif sebesar Rp108.784.000.

Realisasi

Belanja Negara

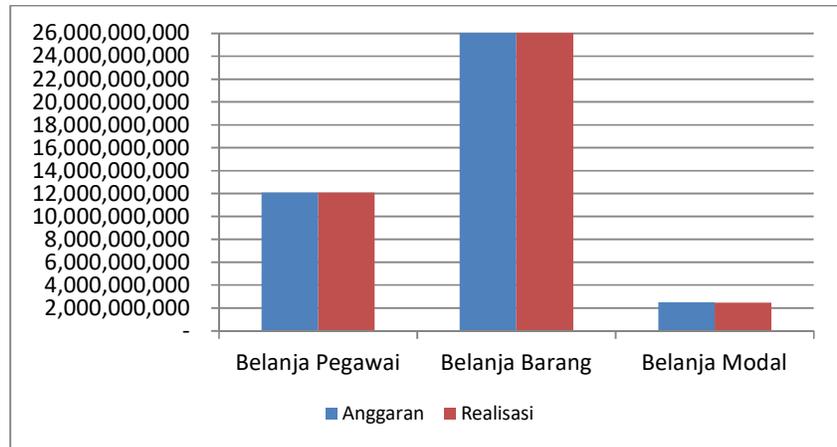
Rp40.969.821.578

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.969.821.578 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp41.626.470.000. Sedangkan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 45.742.062.669. Perbandingan realisasi belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 10,43% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12,076,248,406	10,305,312,697	17.18
Belanja Barang	26,412,641,839	35,145,919,871	(24.85)
Belanja Modal	2,480,931,333	290,830,101	753.05
Total Belanja (Netto)	40,969,821,578	45,742,062,669	(10.43)



Belanja

Pegawai

Rp12.076.248.406

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.076.248.406 dan Rp10.305.312.697. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 27,33% dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat dan kenaikan grade tunjangan kinerja beberapa pegawai Stasiun PSDKP Pontianak serta adanya penambahan pegawai PPPK pada Semester II Tahun 2023 sebanyak 16 orang, dan penambahan pegawai PPPK pada bulan April 2024 sebanyak 2 org, dan kenaikan PPh 21. Rincian pegawai Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

No	Unit Kerja	PNS	Pegawai Kontrak		PPPK	Jumlah
			PPNPN	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	27	9	13	13	62
	KP. Hiu Macan 01	16	-	-	2	16
	KP. Hiu 11	10	-	-	1	10
2	Wilker PSDKP Sungai Rengas	2	2	-	-	4
3	Wilker PSDKP Mempawah	1	2	-	-	3
4	Wilker PSDKP Entikong	1	2	1	-	4
5	Wilker PSDKP Kapuas Hulu	2	1	1	-	4
6	Satwas SDKP Sambas	5	1	2	1	8
7	Wilker PSDKP Singkawang	1	1	-	-	2
8	Wilker PSDKP Jagoibabang	1	2	-	-	3
9	Wilker PSDKP Selakau	1	-	-	1	1
10	Wilker PSDKP Sajingan	1	1	-	-	2
11	Satwas SDKP Kayong Utara	4	2	-	-	6
12	Wilker PSDKP Ketapang	4	-	-	-	4
13	Satwas SDKP Kotawaringin Barat	3	1	-	-	4
14	Wilker PSDKP Seruyan	2	-	-	-	2
Total		81	24	17	18	135

Rincian pegawai dengan jabatan fungsional tertentu yaitu:

NO	URAIAN	PNS	PPPK	JUMLAH	TOTAL
Pengawas Perikanan					
1	Pengawas Perikanan Ahli Muda	7		7	35
	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	6	6	12	
	Asisten Pengawas Perikanan Mahir	1		1	
	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	4	4	8	
	Asisten Pengawas Perikanan Pemula		7	7	
Jumlah		18	17	35	
Pengawas Perikanan Kelautan					
2	Pengawas Kelautan Ahli Muda	4		4	8
	Pengawas Kelautan Ahli Pertama	1		1	
	Asisten Pengawas Kelautan Mahir	1		1	
	Asisten Pengawas Kelautan Terampil	1		1	
	Asisten Pengawas Kelautan Pemula	1		1	
Jumlah		8	0	8	
Pranata Perizinan					
3	Penata Perizinan Ahli Muda	2		2	3
	Penata Perizinan Ahli Pertama	1		1	
Jumlah		3	0	3	
Pranata SDM					
4	Pranata SDM Aparatur Terampil	1		1	1
Pranata Komputer					
5	Pranata Komputer Terampil		1	1	1
Total JFT		30	18	48	48

Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Gaji dan Tunjangan PNS	4,778,673,200	4,413,571,825	8.27
Gaji dan Tunjangan PPPK	870,659,555	259,782,255	235.15
Uang Makan PNS	351,734,000	393,580,000	(10.63)
Uang Makan PPPK	75,945,000	35,188,000	115.83
Uang Lembur PNS	285,365,000	428,167,000	(33.35)
Uang Lembur PPPK	138,380,000	66,715,000	107.42
Tunjangan Kinerja PNS	4,737,016,267	4,447,036,573	6.52
Tunjangan Kinerja PPPK	914,420,384	296,460,044	208.45
Jumlah Belanja Netto (LRA)	12,152,193,406	10,340,500,697	17.52
Pengembalian Belanja Pegawai	926,514	7,431,522	-
Jumlah Belanja Bruto (Neraca)	12,153,119,920	10,347,932,219	17.44

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp926.514 berupa:

- Pengembalian pembulatan gaji PNS sebesar Rp1.514 yang terdiri dari:
 - Pemotongan langsung melalui SPM nomor 00121T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421305000531 tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp928.
 - Pemotongan langsung melalui SPM nomor 00122T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001680 tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp482.
 - Pemotongan langsung melalui SPM nomor 00143T/440847/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001928 tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp72.
 - Pemotongan langsung melalui SPM nomor 01165T/440847/2024 tanggal 18 November 2024 dan SP2D nomor 240421305003584 tanggal 15 November 2024 sebesar Rp32.

- Pengembalian belanja tunjangan umum sebesar Rp925.000 yang terdiri dari:
 - Pengembalian belanja melalui billing dengan NTPN 9BE495229QIJCD7A dan NTB 000000092085 tanggal 8 Mei 2024 berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Umum PNS Bulan Januari - April Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najoan, A.Md sebesar Rp740.000.
 - Pengembalian belanja melalui billing dengan NTPN 476D11GCAGAVRP5 dan NTB 496815959821 tanggal 14 Mei 2024 berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Umum Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najoan, A.Md Rp.185.000

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp26.412.641.839

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.412.641.839 dan Rp35.145.919.871. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 4,56% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal tersebut dikarenakan anggaran belanja barang TA 2024 lebih sedikit daripada TA 2023 dan sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat anggaran yang masih di blokir (*automatic adjustment*) sebesar Rp370.143.000. Sebagian besar belanja barang berasal dari belanja barang non operasional yaitu belanja bahan berupa bahan bakar minyak untuk KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11, dengan rincian realisasi belanja BBM sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

NO	KAPAL PENGAWAS	REALISASI ANGGARAN BBM KAPAL PENGAWAS DAN HARI OPERASI						
		ANGGARAN (Rp)						
		PAGU AWAL	AA TAHAP I	REVISI KE 1	REVISI KE 2	PAGU AKHIR	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2024	% REALISASI
1	STASIUN PSDKP PONTIANAK	9,229,028,000	- 1,261,260,000	1,258,777,000	- 1,043,000	9,225,502,000	9,225,502,000	100.00%
	i. KP. HIU MACAN 01	5,416,290,000	- 739,530,000	1,073,802,000	- 1,043,000	5,749,519,000	5,749,519,000	100.00%
	ii. KP. HIU 11	3,812,738,000	- 521,730,000	184,975,000	-	3,475,983,000	3,475,983,000	100.00%

Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 711.

Selain itu terdapat belanja barang untuk operasional perkantoran antara lain berupa pembayaran langganan daya dan jasa, honor pegawai kontrak, konsumsi rapat, atk dan komputer supplies, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lainnya yang mendukung kegiatan operasional kantor.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 30 SEPTEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1,758,433,752	2,856,069,098	(38.43)
Belanja Barang Persediaan (5218)	208,484,872	226,723,015	(8.04)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	13,335,392,925	24,840,470,263	(46.32)
Belanja Pemeliharaan (5231)	6,573,194,621	3,544,156,315	85.47
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	3,488,434,132	2,569,508,089	35.76
Belanja Jasa (5221)	1,048,701,537	1,108,993,091	(5.44)
Jumlah Belanja Netto (LRA)	26,412,641,839	35,145,919,871	(24.85)
Pengembalian Belanja	8,873,700	1,298,800	-
Total Belanja Bruto (NERACA)	26,421,515,539	35,147,218,671	(24.83)

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp8.873.700 yang diperoleh dari:

- Pengembalian belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp8.061.700 yang terdiri dari:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Pengembalian belanja melalui NTPN D42532CPQCRQDGPF tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp390.450 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat RIB Tahap I.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 6F86F397A7E6QGOP tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 037 Tahap II.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 1B7B76QT9HNOEGM0 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp883.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 003 Tahap III.
- Pengembalian belanja melalui NTPN A23FF5UFPN5C1GOB tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp836.000 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 037 Tahap I.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 0B0B1397A7E6QGLL tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 003 Tahap II.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 699392CPQCRQDGVV tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp655.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap IV.
- Pengembalian belanja melalui NTPN EC6065UFPN5C1GV1 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp655.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap I.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 311395UFPN5C1GJJ tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 003 Tahap I.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Pengembalian belanja melalui NTPN 3FE0545KQ20J7GVN tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp655.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap III.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 139D01GCAI9E0GVC tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp660.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap II.
- Pengembalian belanja melalui NTPN 868C57NAPCA4RGR3 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 037 Tahap III.
- Pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp812.000 yang terdiri dari:
 - Pengembalian sebesar Rp500.000 melalui NTPN 8B0B35UFPN2VNGD8 tanggal 16 Juli 2024.
 - Pengembalian sebesar Rp312.000 melalui NTPN F8B255UFPROTEEFH tanggal 19 Desember 2024.

Belanja Modal

Rp2.480.931.333

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.480.931.333 dan Rp290.830.101.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 753,05%. Hal tersebut dikarenakan terdapat belanja modal pembangunan fisik dan kenaikan belanja modal peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	616,398,900	260,437,360	136.68
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	171,644,850	0	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	30,392,741	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,692,887,583	0	0.00
Jumlah Belanja	2,480,931,333	290,830,101	753.05
Pengembalian Belanja	0	-	-
Jumlah Belanja	2,480,931,333	290,830,101	753.05

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, hal tersebut disebabkan tidak dianggarkannya belanja modal tanah pada tahun anggaran 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp616.398.900 dan Rp260.437.360 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2024 dan 2023*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

URAIAN	REALISASI 31 SEPTEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pompa Bensin/Minyak Transportable	6,800,000		
Sepeda Motor	61,700,000		
Mesin Bor Tangan	1,920,000	1,200,000	60.00
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,500,000		
Alat Ukur Sigmat	-		
Lemari Besi/Metal	5,100,000	4,925,000	3.55
Rak Besi	22,800,000		
Filing Cabinet Besi	4,700,000	4,430,000	6.09
Papan Pengumuman	14,300,000		
Kursi Besi/Metal	-	1,581,000	-100.00
Kursi Fiber Glas/Plastik	1,600,000	6,400,000	-75.00
Mesin Cuci	9,600,000		
Alat Pembersih Lainnya	6,100,000		
Lemari Es	5,120,000		
A.C. Split	74,091,000	12,125,000	511.06
Kipas Angin	-		
Chiller	3,550,000		
Kompas Gas (Alat Dapur)	-		
Televisi	17,450,000	2,289,000	662.34
Loudspeaker	-		
Sound System	44,417,900		
Megaphone	-		
Camera Video	11,600,000		
Tangga Aluminium	-		
Dispenser	-		
Lampu	-		
Tempat Sampah	-		
Digital LED Running Text	5,500,000		
Camera Under Water	16,900,000		
Camera Digital	29,999,999		
Camera Conference	19,800,000		
Lap Top	109,800,000	63,875,000	71.90
Tablet PC	55,100,001	12,598,000	337.37
Printer (Peralatan Personal Komputer)	20,050,000	8,295,000	141.71
Sofa		5,661,000	
Meja Kerja Kayu		4,839,000	
Personal Komputer		18,850,000	
Mesin Absensi		13,948,000	
Scanner		24,898,000	
CCTV		15,413,360	
Bangku Panjang Besi/Metal		3,450,000	
Chiller		8,240,000	
Jet Pump		6,750,000	
Meja Rapat		21,065,000	
Air Cleaner		7,400,000	
Reach in Freezer		4,665,000	
Senter, Under Water Kinetic		7,540,000	
Mesin tempel speedboat	66,900,000		
Jumlah Belanja	616,398,900	260,437,360	136.68
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	616,398,900	260,437,360	136.68

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.692.887.583 dan Rp0. Realisasi tersebut diperoleh dari:

- Pembangunan Garasi Satwas SDKP Kayong Utara sebesar Rp277.900.000, oleh CV. Lestari melalui kontrak nomor SP.265/PPK.Sta.4/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 melalui kontrak, dengan rincian pembayaran:
 - SPM nomor 00979T/440847/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006554 tanggal 15 Oktober 2024 sebesar Rp264.005.000, dan
 - SPM 00980T/440847/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006590 tanggal 15 Oktober 2024 sebesar Rp13.895.000.
- Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp1.196.000.000, oleh CV. Mitra Utama Abadi melalui Kontrak nomor SP.331/PPK.Sta.4/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, dengan rincian pembayaran:
 - SPM 00729T/440847/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan SP2D nomor 240421302008405 tanggal 19 Agustus 2024 sebesar Rp326.375.085,
 - SPM nomor 01065T/440847/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421302011537 tanggal 28 Oktober 2024 sebesar Rp380.770.933,
 - SPM 01154T/440847/2024 tanggal 13 November 2024 dan SP2D nomor 240421302012491 tanggal 15 November 2024 sebesar Rp190.385.466,
 - SPM nomor 01300T/440847/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015015 tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp238.668.516.

- SPM nomor 01314T/440847/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015136 tanggal 20 Desember 2024 sebesar Rp59.800.000.
- Pembangunan Gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat sebesar Rp173.187.583, oleh CV. Aemal Mulya Sejahtera melalui kontrak SPK.580/PPK.Sta.4/XI/2024 tanggal 1 November 2024, dengan rincian:
 - SPM nomor 01133T/440847/2024 tanggal 11 November 2024 dan SP2D nomor 240421302012390 tanggal 13 November 2024 sebesar Rp51.956.725,
 - SPM nomor 01254T/440847/2024 tanggal 11 November 2024 dan SP2D nomor 240421302014507 tanggal 13 November 2024 sebesar Rp69.275.033,
 - SPM nomor 01328T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015277 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp43.296.896
 - SPM nomor 01329T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015278 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp8.659.379,
- Pembangunan Garasi Sepeda Motor sebesar Rp45.800.000, melalui SPM nomor 01308T/440847/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010015 tanggal 20 Desember 2024.

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp171.644.850 dan Rp0. Realisasi tersebut diperoleh dari:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Perencanaan Garasi Satwas SDKP Kayong Utara sebesar Rp16.816.500, sebesar Rp16.816.500 oleh CV. Cipta Sarana Pratama melalui kontrak nomor SPK.131/PPK.Sta.4/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang telah dibayarkan dengan SPM 00230T/440847/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421304001162 tanggal 2 April 2024,
- Pengawasan Garasi Satwas SDKP Kayong Utara sebesar Rp19.785.750, oleh CV. Daffandra Porostudio melalui kontrak nomor SPK.267/PPK.Sta.4/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan SPM nomor 00981T/440847/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006550 tanggal 15 Oktober 2024,
- Reviu Perencanaan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp54.356.700, oleh CV. Daffandra Porostudio melalui kontrak nomor SPK.129/PPK.Sta.4/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan SPM nomor 00304T/440847/2024 tanggal 18 April 2024 dan SP2D nomor 240421304001531 tanggal 22 April 2024 sebesar Rp54.356.700,
- Pengawasan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp52.114.500, oleh CV. Cipta Sarana Pratama melalui SPK nomor SPK.333/PPK.Sta.4/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dengan SPM nomor 01318T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010108 tanggal 23 Desember 2024.
- Reviu Perencanaan Pembangunan Gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat sebesar Rp11.155.500, oleh CV. Sarana Karya Sejahtera melalui kontrak nomor SPK.421/PPK.Sta.4/IX/2024 tanggal 5 September 2024 dengan SPM nomor 00973T/440847/2024 tanggal 9

Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006538 tanggal 15 Oktober 2024 sebesar Rp9.482.175 dan SPM nomor 01331T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010296 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp1.673.325, dan

- Pengawasan Pembangunan Gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat sebesar Rp17.415.900, oleh CV. Kirana Jaya Konsultan melalui kontrak nomor SPK.583/PPK.Sta.4/XI/2024 tanggal 1 November 2024 dengan SPM nomor 01330T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010311 tanggal 27 Desember 2024.

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5.1. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi belanja modal penambahan nilai jaringan pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2024 dan 2023.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Terdapat pengembalian sisa UP/TUP yaitu:

- Pengembalian UP dengan NTPN 7ECE10JUQSDRVE76 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp272.876.
- Pengembalian UP dengan NTPN A178F5UFPRS6DE73 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp86.551.606.
- Pengembalian TUP dengan NTPN EB0326QT9MEIQE6V tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp500.920.852.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai di Brankas		-
Uang di Rekening Bank		-
Uang Muka (Voucher)		-
Saldo BPP		-
Kwitansi UP yang belum di SPMkan		-
Sub Total I	-	-
BP LS-Bendahara		
Sub Total II	-	-
Jumlah (Sub Total I - II)	-	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca		-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

<i>Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0</i>	C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Piutang PNBP Rp0</i>	C.4 Piutang PNBP Tidak terdapat saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Piutang Bukan Pajak Rp0</i>	C.5 Piutang Bukan Pajak Piutang bukan pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp3.887.600.
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Bagian Lancar TPA Rp0</i>	C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>	C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka Rp0 **C.9 Beban Dibayar di Muka**
 Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0 **C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**
 Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Persediaan Rp797.126.246 **C.11 Persediaan**
 Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp797.126.246 dan Rp790.800.317.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	17,680,750	62,157,200
Suku Cadang	779,445,496	728,643,117
Jumlah	797,126,246	790,800,317

Rincian mutasi transaksi persediaan pada modul pelaporan adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 1 Januari 2024 (Saldo Awal 2024)	790,800,317
Realisasi Belanja 521811 31 Desember 2024	208,484,872
Realisasi Belanja 523123 31 Desember 2024	559,248,356
Total Realisasi 31 Desember 2024	767,733,228
Saldo Awal + Total Realisasi + Total	1,558,533,545
Beban Persediaan Konsumsi	220,149,822
Beban Persediaan Suku Cadang	508,445,977
Beban Persediaan Rusak/Usang	32,811,500
Total Beban	761,407,299
Selisih	797,126,246
Neraca 31 Desember 2024	797,126,246
Selisih	0

Rincian mutasi transaksi pada modul persediaan adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2023	790,800,317
MUTASI TAMBAH	
M02 Pembelian	768,718,478
TOTAL MUTASI TAMBAH	768,718,478
MUTASI KURANG	
K01 Habis Pakai	-729,581,049
K04 Usang	-32,811,500
TOTAL MUTASI KURANG	-762,392,549
SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2024	797,126,246

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp768.718.478 merupakan transaksi pembelian dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp 209.470.122
- Suku cadang sebesar Rp559.248.356

Mutasi kurang persediaan sebesar Rp762.392.549

➤ berupa transaksi habis pakai sebesar Rp729.581.049 dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp221.135.072
- Suku Cadang sebesar Rp502.445.977

➤ berupa transaksi usang sebesar Rp32.811.500 berupa barang konsumsi, yang telah dilakukan telaahan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

penghapusan persediaan melalui surat nomor 822/PSDKPSta.4/PL.750/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dan telah dilakukan persetujuan melalui surat nomor B.4215/PSDKP.1/PL.750/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, dengan rincian barang sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN
1	Buku NCR	15	Buku	610,500
2	Form Distribusi Perikanan	36	Buku	2,340,000
3	Form UPI Besar/12.1	12	Buku	900,000
4	Form UPI Kecil/12.1	12	Buku	900,000
5	Form Berangkat Angkut 12.1	12	Buku	1,080,000
6	Form Pengawasan Penangkapan LKR/12.1	7	Buku	490,000
7	Form Pengawasan Budidaya LKR/12.1	7	Buku	490,000
8	Form Pengawasan Distribusi LKR/12.1	7	Buku	490,000
9	Form HPUPI/12.1	29	Buku	2,030,000
10	Cetak Form HPK Pengangkut Ikan saat Kedatangan	42	Buku	2,394,000
11	Cetak Form HPK Penangkap Ikan saat Kedatangan	54	Buku	3,240,000
12	Cetak Form HPK Pengangkut Ikan saat keberangkatan	74	Buku	4,218,000
13	Cetak Form HPK Penangkap Ikan saat keberangkatan	51	Buku	3,060,000
14	Cetak Form Kapal Latih	9	Buku	513,000
15	Cetak Form kapal penelitian	12	Buku	684,000
16	Cetak Form Budidaya	36	Buku	2,052,000
17	Cetak Form UPI	37	Buku	2,109,000
18	Cetak Form SLO	41	Buku	2,337,000
19	Cetak Form Ekoper/SDK	1	Buku	57,000
20	FORM MUATAN KAPAL/SDK	1	Buku	57,000
21	Cetak Form UPI Skala Menengah	24	Buku	1,440,000
22	Cetak Form UPI Skala Kecil	22	Buku	1,320,000
J U M L A H :		541	unit	32,811,500

Rincian persediaan periode 31 Desember 2024 adalah:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Kode	Uraian	Nilai
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	1,428,000
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	800,000
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	90,000
1.01.03.01.005	Buku Tulis	284,250
1.01.03.01.007	Penggaris	18,000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	341,000
1.01.03.01.012	Staples	308,000
1.01.03.01.013	Isi Staples	100,000
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	874,000
1.01.03.02.001	Kertas HVS	3,707,000
1.01.03.02.004	Amplop	50,000
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	2,664,000
1.01.03.04.006	USB/Flash Disk	1,300,000
1.01.03.04.010	Mouse	3,996,000
1.01.03.04.999	Bahan Komputer Lainnya	1,720,500
JUMLAH BARANG KONSUMSI		17,680,750
117114	SUKU CADANG	
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	779,445,496
JUMLAH SUKU CADANG		779,445,496

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor SO/948/PSDKPSta.4/PL.760/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp17.680.750 terdiri dari alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, buku tulis, penggaris, alat perekat, staples, isi staples, alat tulis kantor lainnya, kertas HVS, amplop, tinta/toner printer, USB/Flash Disk, Mouse, dan Bahan komputer lainnya. Pada bahan cetak lainnya merupakan bahan cetak form pengawasan, HPK, dan SLO baik yang sudah terdistribusi maupun yang belum terdistribusi di seluruh Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Persediaan suku cadang sebesar Rp779.445.496. Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu Macan 01, Hiu 11, Speedboat Pengawas, dan Rigid Inflatable Boat yang masih ada tahun 2024.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Tagihan TP/TGR **C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Rp0 Tidak terdapat nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0 **C.13 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0 **C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan (Rp19.438).

Tanah Rp11.836.746.000 **C.15 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.836.746.000 dan Rp11.836.746.000 dengan mutasi sebesar Rp 0. Semua aset tanah digunakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebagai penunjang kegiatan di Satwas dan Wilker PSDKP yang merupakan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Per Tanggal 31 Desember 2024

No	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	44.908	Jl. Dr. M. Hatta, Kubu Raya, Kalimantan Barat	10.543.141.000
2	552	Jl. Malindo, Entikong, Kalimantan Barat	412.867.000
3	934	Jl. Hayam Wuruk, Ketapang, Kalimantan Barat	475.509.000
4	3.431	Jl. Swadaya, Waringin Barat, Kalimantan Tengah	405.229.000
Jumlah			11.836.746.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp60.109.804.498*

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp60.109.804.498 dan Rp65.758.612.092. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.648.807.594. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	65,758,612,092
Mutasi tambah:	
Pembelian	549,498,900
Transfer masuk	361,318,060
Reklasifikasi Masuk	932,512,250
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	66,900,000
Perolehan lainnya	12,100,000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7,000,000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(12,100,000)
Reklasifikasi Keluar	(932,512,250)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(6,633,524,554)
Saldo per 31 Desember 2024	60,109,804,498
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(57,197,970,898)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,911,833,600

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.929.329.210 diperoleh dari:

- Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp549.498.900, sedangkan pembelian peralatan dan mesin ekstrakomptabel (dibawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000) dan tidak tercatat di dalam neraca sebesar Rp83.294.050.
 - Pembelian Kamera Sony sebanyak 1 unit sebesar Rp29.999.999 dan 2 unit Tablet PC IPAD Air sebesar Rp16.000.001 melalui SPM 000132T/440847/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001796 tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp46.000.000.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Pembelian 2 unit Tablet PC Samsung sebesar Rp12.100.000 melalui SPM 00133T/440847/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001797 tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp24.200.000.
- Pembelian sebesar Rp49.414.000 melalui SPM 00219T/440847/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan SP2D Nomor 240421302002576 tanggal 1 April 2024 yang terdiri dari:
 - * 2 Unit Lemari Arsip sebesar Rp9.800.000.
 - * 4 Unit AC sebesar Rp16.614.000.
 - * 1 Unit Kursi Direktur sebesar Rp1.600.000
 - * 1 Unit Sound System sebesar Rp21.400.000
- Pembelian AC sebanyak 2 unit sebesar Rp8.300.000 dan 1 Unit Laptop sebesar Rp12.500.000 melalui SPM nomor 00385T/440847/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan SP2D nomor 240421302004387 tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp20.800.000.
- Pembelian melalui SPM nomor 00391T/440847/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan nomor SP2D 240421302004475 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp97.650.000 dengan rincian:
 - * 1 unit Video Conference sebesar Rp19.800.000
 - * 2 unit printer sebesar Rp20.050.000
 - * 4 unit laptop sebesar Rp57.800.000
- Pembelian 1 unit running teks sebesar Rp5.500.000 melalui SPM nomor 00472T/440847/2024 tanggal 9 Juni 2024 dan nomor SP2D 240421303002073 tanggal 10 Juni 2024.
- Pembelian 1 unit papan visual sebesar Rp14.300.000 melalui SPM 00559T/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan SP2D nomor 240421303002344 tanggal 27

Juni 2024.

- Pembelian melalui SPM 00621T/440847/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan SP2D Nomor 240421302006843 tanggal 16 Juli 2024 sebesar Rp25.050.000 berupa:
 - 1 unit Televisi LED 65 inch sebesar Rp8.500.000
 - 1 unit Lemari Es Showcase sebesar Rp3.550.000
 - 1 unit Lemari Es 2 pintu sebesar Rp3.400.000
 - 1 unit Mesin Cuci sebesar Rp9.600.000
- Pembelian 1 unit Lemari Es sebesar Rp1.720.000 melalui SPM nomor 00625T/440847/2024 tanggal 17 Juli 2024 dan SP2D nomor 240421303002713 tanggal 18 Juli 2024.
- Pembelian 1 unit kamera insta 360 sebesar Rp11.600.000 melalui SPM nomor 00633T/440847/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan SP2D nomor 240421304003837 tanggal 23 Juli 2024.
- Pembelian 2 unit soundsystem melalui SPM nomor 00747T/440847/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan SP2D nomor 240421303003186 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp13.317.900.
- Pembelian sebesar Rp26.050.000 melalui SPM nomor 00887T/440847/2024 tanggal 24 September 2024 dan SP2D nomor 240421302009952 tanggal 26 September 2024 berupa pembelian AC 2 PK sebanyak 3 unit dan AC 1 PK sebanyak 1 unit.
- Pembelian 1 unit TV sebesar Rp2.900.000 melalui SPM nomor 001025T/440847/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421303004083 tanggal 17 Oktober 2024.
- Pembelian 1 unit bor dan 1 unit Impact AR sebesar Rp3.420.000 melalui SPM nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

001214T/440847/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421701001386 tanggal 3 Desember 2024.

- Pembelian 1 unit pompa oli sebesar Rp3.500.000 melalui SPM nomor 001225T/440847/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421701001386 tanggal 5 Desember 2024.
- Pembelian 1 unit TV sebesar Rp2.350.000 melalui SPM nomor 001247T/440847/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421303005062 tanggal 11 Desember 2024.
- Pembelian 2 unit kendaraan roda dua (Vario 125) sebesar Rp61.700.000 melalui SPM nomor 001270T/440847/2024 tanggal 13 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304009515 tanggal 17 Desember 2024.
- Pembelian sebesar Rp66.200.000 melalui SPM nomor 001323T/440847/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015236 tanggal 27 Desember 2024, dengan rincian:
 - 1 unit TV sebesar Rp3.700.000
 - 2 unit Jet Cleaner sebesar Rp6.100.000
 - 2 unit Go Pro sebesar Rp16.900.000
 - 2 unit Laptop sebesar Rp39.500.000
- Pembelian sebesar Rp18.000.000 melalui SPM nomor 001326T/440847/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015240 tanggal 27 Desember 2024 berupa:
 - 1 unit AC 1,5 PK sebesar Rp6.300.000
 - 1 unit AC 1 PK sebesar Rp4.200.000
 - 3 unit Rak besi 5 tingkat sebesar Rp7.500.000
- Pembelian 1 unit Soundsistem dan 1 pompa oli

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

sebesar Rp13.000.000 melalui SPM nomor 001335T/440847/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421701002486 tanggal 31 Desember 2024.

- Pembelian sebesar Rp42.827.000 melalui SPM nomor 001338T/440847/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421701002490 tanggal 31 Desember 2024, berupa:
 - 1 unit AC 1 PK sebesar Rp4.848.000
 - 1 unit AC 2 PK sebesar Rp7.779.000
 - 6 unit Rak besi 5 tingkat sebesar Rp15.300.000
 - 2 unit tablet sebesar Rp14.900.000

Selain pembelian peralatan dan mesin tersebut di atas terdapat pembelian peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp19.327.600 yang dibeli melalui:

- SPM nomor 00323T/440847/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan SP2D nomor 240421303001361 tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp1.349.800 berupa kotak sampah sebanyak 2 unit.
- SPM nomor 00327T/440847/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan SP2D nomor 240421303001364 tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp1.830.000 berupa kompor gas sebanyak 2 unit sebesar Rp1.230.000 dan 1 unit dispenser sebesar Rp600.000.
- SPM nomor 00554T/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan SP2D nomor 240421303002332 tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp5.938.300 berupa:
 - * Dispenser sebanyak 4 unit sebesar Rp2.448.000
 - * Tempat sampah sebanyak 1 unit sebesar Rp1.540.000, dan
 - * Tangga Alumunium sebanyak 1 unit sebesar

Rp997.500.

- * Kursi roda sebanyak 1 unit sebesar Rp952.800.
- SPM nomor 00557T/440847/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan SP2D nomor 240421303002342 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp4.750.000 berupa Jangka Sorong (Digital Caliper) sebanyak 5 unit.
- Pembelian 2 unit kipas angin sebesar Rp1.060.000 melalui SPM nomor 00625T/440847/2024 tanggal 17 Juli 2024 dan SP2D nomor 240421303002713 tanggal 18 Juli 2024.
- Pembelian melalui SPM nomor 00747T/440847/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan SP2D nomor 240421303003186 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp1.669.500 berupa:
 - * 1 unit Loudspeaker sebesar Rp772.500, dan
 - * 1 unit megaphone sebesar Rp927.000
- Pembelian melalui SPM 00766T/440847/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan SP2D nomor 240421303003265 tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp800.000.
- Pembelian melalui SPM 00859T/440847/2024 tanggal 13 September 2024 dan SP2D nomor 240421303003596 tanggal 17 September 2024 sebesar Rp1.900.000 berupa dispenser 1 unit.
- Pembelian melalui SPM 01213T/440847/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421303004810 tanggal 3 Desember 2024 sebesar Rp5.886.450 berupa 2 unit kompor gas dan 9 unit dispenser.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

No	Uraian	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Pompa Bensin/Minyak Transportable	2	6,800,000	-	-
2	Sepeda Motor	2	61,700,000	-	-
3	Mesin Bor Tangan	1	1,920,000	-	-
4	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	1,500,000	-	-
5	Alat Ukur Sigmat	-	-	5	4,750,000
6	Lemari Besi/Metal	1	5,100,000	-	-
7	Rak Besi	9	22,800,000	-	-
8	Filing Cabinet Besi	1	4,700,000	-	-
9	Papan Pengumuman	2	14,300,000	-	-
10	Kursi Besi/Metal	-	-	52	32,132,800
11	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	1,600,000	-	-
12	Mesin Cuci	1	9,600,000	-	-
13	Alat Pembersih Lainnya	2	6,100,000	-	-
14	Lemari Es	2	5,120,000	-	-
15	A. C. Split	14	74,091,000	-	-
16	Kipas Angin	-	-	2	1,060,000
17	Chiller	1	3,550,000	-	-
18	Kompur Gas (Alat Dapur)	-	-	4	2,301,450
19	Televisi	4	17,450,000	-	-
20	Loudspeaker	-	-	1	772,500
21	Sound System	4	44,417,900	-	-
22	Megaphone	-	-	1	927,000
23	Camera Video	1	11,600,000	-	-
24	Tangga Aluminium	-	-	2	1,797,500
25	Dispenser	-	-	16	9,763,000
26	Lampu	-	-	16	2,800,000
27	Tempat Sampah	-	-	33	26,989,800
28	Digital LED Running Text	1	5,500,000	-	-
29	Camera Under Water	2	16,900,000	-	-
30	Camera Digital	1	29,999,999	-	-
31	Camera Conference	1	19,800,000	-	-
32	Lap Top	7	109,800,000	-	-
33	Tablet PC	4	55,100,001	-	-
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	20,050,000	-	-
Total		67	549,498,900	132	83,294,050

- Pembelian sebesar Rp58.080.000 melalui SPM 01214T/440847/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421701001386 tanggal 3 Desember 2024 berupa:
- 16 unit senter sebesar Rp2.800.000
 - 43 unit kursi sebesar Rp23.220.000
 - 24 unit tempat sampah sebesar Rp24.100.000
 - 8 unit kursi roda sebesar Rp7.960.000

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

➤ Transfer masuk sebesar Rp361.318.060 melalui berita acara serah terima barang milik negara melalui nomor B.5362/SJ.6/PL.450/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diperoleh dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian barang:

- 28 unit lemari kayu sebesar Rp172.150.420
- 13 unit laci box sebesar Rp18.733.000
- 15 unit meja kerja kayu sebesar Rp38.520.000
- 40 unit kursi besi sebesar Rp77.706.000
- 8 unit kursi kayu sebesar Rp36.608.000
- 2 unit meja rapat sebesar Rp8.950.640
- 1 unit nakas sebesar Rp950.000
- 2 unit meubelair lainnya sebesar Rp7.700.000

Nilai transfer tersebut berbeda dengan nilai yang tercantum dengan nilai yang terdapat dalam neraca yaitu Rp7.328.750, nilai tersebut berbeda oleh karena adanya akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp353.989.310.

➤ Reklasifikasi masuk sebesar Rp932.512.250 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi masuk sebesar Rp925.512.250 melalui surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor 703/PSDKPSta.4/PL.760/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang disebabkan oleh adanya kesalahan kodefikasi, dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Semula		Menjadi		Nilai
Reklas Keluar	Unit	Reklas Masuk	Unit	
Jet Pump	9	Mesin Pompa Air PMK	9	105,623,000
Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	5	Water Analysis Kit	5	249,250,000
Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	27	Alat Ukur Sigmat	27	9,578,250
Timbangan Elektronik	3	Timbangan Barang	3	7,200,000
Kapasitas Sedang (Alat Pengolahan Air)	1	Water Filter	1	524,205,000
Infrared Termometer	10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10	22,000,000
Teropong (Optik)	2	Teropong/Keker	2	7,656,000
Total	57	Total	57	925,512,250

- Reklasifikasi masuk sebesar Rp7.000.000 melalui surat koreksi pencatatan modul aset tetap nomor 832/PSDKPSta.4/PL.760/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang disebabkan oleh adanya kesalahan kodefikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Semula		Menjadi		Nilai
Reklas Keluar	Unit	Reklas Masuk	Unit	
Teropong (senjata lain - lain)	4	Teropong/Keker	4	7,000,000
Total	4	Total	4	7,000,000

- Perolehan lainnya sebesar Rp12.100.000 berupa koreksi pencatatan nilai berkurang Tablet PC semula tercatat 1 unit sebesar Rp24.200.000 menjadi 2 unit sebesar Rp12.100.000 melalui surat keterangan koreksi pencatatan nomor 564/PSDKPSta.4/PL.110/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024
- Pengembangan nilai aset (langsung) sebesar Rp66.900.000 melalui SPM 00829T/440847/2024 tanggal 9 September 2024 dengan nomor SP2D 240421301018076 tanggal 11 September 2024 yang dimasukkan ke dalam NUP kapal patrol pantai.
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp7.000.000 berupa teropong (senjata lain – lain).

Mutasi kurang sebesar Rp7.578.136.804 yang terdiri dari:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp12.100.000 pada Tablet PC melalui surat keterangan koreksi pencatatan nomor 564/PSDKPSta.4/PL.110/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024. Koreksi tersebut dilakukan dikarenakan terdapat kesalahan penginputan kuantitas BMN pada aplikasi SAKTI modul komitmen yang semula 1 unit senilai Rp24.200.000 menjadi 2 unit dengan masing – masing bernilai Rp12.000.000.
- Reklasifikasi keluar sebesar Rp932.512.250 berupa:
 - Reklasifikasi keluar sebesar Rp925.512.250 melalui surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor 703/PSDKPSta.4/PL.760/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang disebabkan oleh adanya kesalahan kodefikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Semula		Menjadi		Nilai
Reklas Keluar	Unit	Reklas Masuk	Unit	
Jet Pump	9	Mesin Pompa Air PMK	9	105,623,000
Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	5	Water Analysis Kit	5	249,250,000
Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	27	Alat Ukur Sigmat	27	9,578,250
Timbangan Elektronik	3	Timbangan Barang	3	7,200,000
Kapasitas Sedang (Alat Pengolahan Air)	1	Water Filter	1	524,205,000
Infrared Termometer	10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10	22,000,000
Teropong (Optik)	2	Teropong/Keker	2	7,656,000
Total	57	Total	57	925,512,250

- Reklasifikasi keluar sebesar Rp7.000.000 melalui surat koreksi pencatatan modul aset tetap nomor 832/PSDKPSta.4/PL.760/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang disebabkan oleh adanya kesalahan kodefikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Semula		Menjadi		Nilai
Reklas Keluar	Unit	Reklas Masuk	Unit	
Teropong (senjata lain - lain)	4	Teropong/Keker	4	7,000,000
Total	4	Total	4	7,000,000

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp6.633.524.554 yang dilakukan usulan penghapusan peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan melalui surat nomor B.2536/PSDKPSta.4/PL.750/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Intrakomptabel		Ektrakomptabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Speed Boat / Motor Tempel	1	-60,000,000	0	0
Water Analysis Kit	5	-249,250,000	0	0
Alat Ukur Sigmat	22	-7,804,500	0	0
Alat Ukur Lainnya	2	-5,912,500	0	0
Lemari Kayu	3	-3,330,000	0	0
Filing Cabinet Besi	3	-3,240,000	0	0
Tabung Pemadam Api	1	-1,666,610	0	0
Papan Visual/Papan Nama	3	-106,318,000	0	0
Alat Penghancur Kertas	1	-3,647,900	0	0
Mesin Absensi	1	-7,953,000	0	0
LCD Projector/Infocus	1	-10,311,400	0	0
Meja Kerja Kayu	6	-4,476,000	0	0
Kursi Besi/Metal	46	-43,083,000	0	0
Kursi Kayu	5	-26,400,000	20	-3,000,000
Meja Rapat	22	-28,490,000	0	0
Meja Komputer	1	-3,850,000	2	-300,000
Tempat Tidur Besi	1	-5,000,000	0	0
Tempat Tidur Kayu	4	-8,470,000	0	0
Meja Makan Kayu	1	-3,600,000	0	0
Meubelair Lainnya	2	-890,000	0	0
Mesin Pemotong Rumput	3	-13,472,500	0	0
Mesin Cuci	1	-9,000,000	0	0
A.C. Split	3	-16,424,000	0	0
Kompore Gas (Alat Dapur)	0	0	3	-1,468,500
Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-353,000	0	0
Televisi	4	-18,732,000	0	0
Megaphone	1	-500,000	0	0
Camera Video	3	-5,732,623,880	0	0
Dispenser	3	-6,835,000	0	0
Handy Cam	2	-14,255,000	0	0
Gordyin/Kray	2	-16,838,250	0	0
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	-2,200,000	0	0
Alat Rumah Tangga Lainnya	1	-1,475,000	0	0
Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	-8,932,544	0	0

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Uraian	Intrakomptabel		Ektrakomptabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Receiver VHF/FM	1	-8,000,000	0	0
Camera Under Water	1	-14,610,000	0	0
Camera Digital	3	-8,653,750	0	0
LCD Monitor	1	-2,200,000	0	0
Teropong/Keker	5	-11,191,000	0	0
GPS Receiver	1	-5,000,000	0	0
Handy Talky (HT)	7	-10,742,000	0	0
Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	1	-11,500,000	0	0
Alat DF Radio SSB	1	-10,000,000	0	0
Unit Pemancar VHF/FM Portable	2	-8,040,000	0	0
Genset	2	-19,779,350	0	0
Binocular Loupe (Alat Kedokteran THT)	1	-1,430,000	0	0
Talang CBR	1	-14,965,000	0	0
Teropong (Senjata Lain - Lain)	4	-7,000,000	0	0
P.C Unit	1	-9,071,000	0	0
Lap Top	4	-35,303,520	0	0
Note Book	1	-5,850,000	0	0
Tablet PC	1	-6,919,200	0	0
Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	-17,935,650	0	0
Total	208	(6,633,524,554)	25	(4,768,500)

Dari usulan tersebut, sebesar Rp858.629.174 sebanyak 226 unit yang telah terdapat persetujuan penjualan barang milik negara (BMN) pada Stasiun PSDKP Pontianak dengan nomor surat B.4411/PSKDP.1/PL.750/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Dan terdapat 3 unit BMN sebesar Rp5.772.663.880 yang belum mendapatkan persetujuan penjualan berupa 1 unit Speedboat/Motor tempel sebesar Rp60.000.000 dan 2 unit Camera Video sebesar Rp5.732.623.880.

Gedung dan Bangunan

Rp14.402.001.836

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp14.402.001.836 dan Rp12.472.114.103. Terdapat mutasi transaksi terhadap

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.929.887.733.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	12,472,114,103
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1,884,087,733
Penyelesaian Pembangunan langsung	45,800,000
Mutasi kurang:	
Transaksi normalisasi BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	14,402,001,836
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2,263,296,984)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	12,138,704,852

Rincian mutasi tambah sebesar Rp1.929.887.733 adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.884.087.733 yang berupa:
 - Bangunan Gudang Tertutup Permanen sebesar Rp1.546.890.483 yang terdiri dari:
 - Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp1.325.292.800 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Perencanaan gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp22.821.600 oleh CV. Cipta Sarana Pratama melalui kontrak nomor SPK.121/Sta.4/PL.421/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 melalui SPM nomor 00128T/440847/2020 tanggal 7 April 2020 dan SP2D 200421301001794 tanggal 8 April 2020.
 - Reviu perencanaan gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp54.356.700 CV. Daffandra Porostudio melalui kontrak nomor SPK.129/PPK.Sta.4/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan SPM nomor 00304T/440847/2024 tanggal 18 April 2024 dan SP2D nomor 240421304001531 tanggal 22 April 2024.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Pembangunan gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp1.196.000.000 oleh CV. Mitra Utama Abadi melalui Kontrak nomor SP.331/PPK.Sta.4/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dengan rincian:
 - Pembayaran uang muka 30% (Tahap I) sebesar Rp326.375.085 melalui SPM 00729T/440847/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan SP2D nomor 240421302008405 tanggal 19 Agustus 2024.
 - Pembayaran 50% (Tahap II) sebesar Rp380.770.933 melalui SPM nomor 01065T/440847/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421302011537 tanggal 28 Oktober 2024.
 - Pembayaran 70% (Tahap III) sebesar Rp190.385.466 melalui SPM 01154T/440847/2024 tanggal 13 November 2024 dan SP2D nomor 240421302012491 tanggal 15 November 2024.
 - Pembayaran 95% (Tahap IV) sebesar Rp238.668.516 melalui SPM nomor 01300T/440847/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015015 tanggal 19 Desember 2024.
 - Pembayaran Retensi 5% (Tahap V) sebesar Rp59.800.000 melalui SPM nomor 01314T/440847/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015136 tanggal 20 Desember 2024.
- Pengawasan pembangunan gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp52.114.500 oleh CV. Cipta

Sarana Pratama melalui SPK nomor SPK.333/PPK.Sta.4/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dengan SPM nomor 01318T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010108 tanggal 23 Desember 2024.

- Gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat sebesar Rp221.597.683 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Perencanaan Gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan kontrak nomor 123/Sta.4/PL.421/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp19.838.700 dengan rincian:
 - Pembayaran 80% sebesar Rp10.625.600 melalui SPM nomor 00108T/440847/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan SP2D 200421301001508 tanggal 27 Maret 2020.
 - Administrasi proyek berupa perjalanan dinas perencanaan pembangunan Satwas SDKP Kotawaringin Barat sebesar Rp9.213.100 melalui SP2D nomor 200421302000329 tanggal 24 Februari 2020 dan SPM 00062T/440847/2020 nomor tanggal 20 Februari 2020.
 - Perencanaan gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat oleh CV. Sarana Karya Sejahtera melalui kontrak nomor SPK.421/PPK.Sta.4/IX/2024 tanggal 5 September 2024 dengan nilai kontrak Rp13.282.000 berupa:
 - Pembayaran 85% Reviu sebesar Rp9.482.175 melalui SPM nomor 00973T/440847/2024

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- tanggal 9 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006538 tanggal 15 Oktober 2024.
- Pembayaran 15% sebesar Rp1.673.325 melalui SPM nomor 01331T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010296 tanggal 27 Desember 2024.
- Pembangunan Gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat sebesar Rp173.187.583 oleh CV. Aemal Mulya Sejahtera melalui kontrak SPK.580/PPK.Sta.4/XI/2024 tanggal 1 November 2024, dengan rincian:
- Pembayaran uang muka 30% Tahap I sebesar Rp51.956.725 melalui SPM nomor 01133T/440847/2024 tanggal 11 November 2024 dan SP2D nomor 240421302012390 tanggal 13 November 2024.
 - Pembayaran Tahap 2 (50%) sebesar Rp69.275.033 melalui SPM nomor 01254T/440847/2024 tanggal 11 November 2024 dan SP2D nomor 240421302014507 tanggal 13 November 2024.
 - Pembayaran Tahap 3 (95%) sebesar Rp43.296.896 melalui SPM nomor 01328T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015277 tanggal 27 Desember 2024.
 - Pembayaran retensi 5% sebesar Rp8.659.379 melalui SPM nomor 01329T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421302015278 tanggal 27 Desember 2024.
- Pengawasan pembangunan gudang Satwas SDKP Kotawaringin Barat oleh CV. Kirana Jaya

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Konsultan melalui kontrak nomor SPK.583/PPK.Sta.4/XI/2024 tanggal 1 November 2024 sebesar Rp17.415.900 melalui SPM nomor 01330T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010311 tanggal 27 Desember 2024.

➤ Gedung Garasi/Pool Permanen sebesar Rp337.197.250 berupa bangunan Garasi Speedboat Satwas SDKP Kayong Utara, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Perencanaan rehab garasi speedboat Satwas SDKP Kayong Utara sebesar Rp22.695.000 yang dikerjakan oleh CV. Sarana Karya Sejahtera melalui kontrak nomor 134/Sta.4/PL.421/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dengan nilai Rp18.425.000 dengan rincian
 - Pembayaran 80% sebesar Rp14.740.000 melalui SPM nomor 00094T/440847/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan SP2D 200421301001314 tanggal 20 Maret 2020.
 - Administrasi Proyek berupa perjalanan dinas sebesar Rp7.955.000 yang telah dibayarkan melalui SP2D nomor 200421302000329 tanggal 24 Februari 2020 dan SPM 00062T/440847/2020 nomor tanggal 20 Februari 2020.
- Reviu perencanaan pembangunan garasi speedboat Satwas SDKP Kayong Utara oleh CV. Cipta Sarana Pratama melalui kontrak nomor SPK.131/PPK.Sta.4/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebesar Rp16.816.500 yang telah dibayarkan melalui SPM 00230T/440847/2024 tanggal 28

- Maret 2024 dan SP2D nomor 240421304001162 tanggal 2 April 2024.
- Pembangunan garasi speedboat Satwas SDKP Kayong Utara oleh CV. Lestari melalui kontrak nomor SP.265/PPK.Sta.4/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp277.900.000, dengan rincian:
 - Pembayaran 95% sebesar Rp264.005.000 yang telah dibayarkan melalui SPM nomor 00979T/440847/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006554 tanggal 15 Oktober 2024.
 - Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp13.895.000 melalui SPM 00980T/440847/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006590 tanggal 15 Oktober 2024.
 - Pengawasan garasi speedboat Satwas SDKP Kayong Utara oleh CV. Daffandra Porostudio melalui kontrak nomor SPK.267/PPK.Sta.4/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp19.785.750 melalui SPM nomor 00981T/440847/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan SP2D nomor 240421304006550 tanggal 15 Oktober 2024.
 - Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp45.800.000 oleh Muhlis dengan kontrak nomor SPK.729/PPK.Sta.4/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 melalui SPM nomor 01308T/440847/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D nomor 240421304010015 tanggal 20 Desember 2024.

Jalan, Jaringan dan Irigasi **C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar *Rp22.153.264.709*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Rp22.153.264.709 dan Rp22.153.264.709. Mutasi saldo jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	22,153,264,709
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2024	22,153,264,709
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(10,699,731,771)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	11,453,532,938

C.19 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp647.298.080*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp647.298.080 dan Rp647.298.080. Nilai tersebut diperoleh dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berupa Peta Digital sebanyak 2 buah melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA.09861/PSDKP.I/PL.430/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp80.355.300. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 yaitu:

- Perencanaan pembangunan Gudang Satwas Kotawaringin Barat sebesar Rp10.625.600.
- Perencanaan Rehab Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara sebesar Rp14.740.000.
- Perencanaan Rehab Mess Operator, dan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp37.821.600.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Keseluruhan KDP tersebut telah dilaksanakan gedung dan bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp65.355.300 dengan rincian:

- Perencanaan pembangunan Gudang Satwas Kotawaringin Barat sebesar Rp10.625.600 menjadi aset definitif.
- Perencanaan Rehab Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara sebesar Rp14.740.000 menjadi aset definitif, dan
- Perencanaan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp22.821.600 menjadi aset definitif.

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp15.000.000 berupa penghapusan 7 NUP Konstruksi Dalam Pembangunan dengan tahun perolehan 2020 melalui SK Penghapusan BMN nomor 1282/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan nilai buku 15.000.000 dengan rincian:

- Perencanaan rehab mes operator NUP 124 sebesar Rp2.000.000,
- Perencanaan rehap mes operator NUP 125 sebesar Rp2.000.000,
- Perencanaan rehap mes operator NUP 126 sebesar Rp2.000.000,
- Perencanaan rehap mes operator NUP 127 sebesar Rp2.000.000,
- Perencanaan rehap mes operator NUP 128 sebesar Rp2.000.000,
- Perencanaan rehap mes operator NUP 129 sebesar Rp2.500.000, dan
- Perencanaan rehap mes operator NUP 125 sebesar Rp2.500.000.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp70.160.999.653

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing – masing Rp70.160.999.653 dan Rp72.532.616.530. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	60,109,804,498	57,197,970,898	2,911,833,600
2	Gedung dan Bangunan	14,402,001,836	2,263,296,984	12,138,704,852
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,153,264,709	10,699,731,771	11,453,532,938
4	Aset Tetap Lainnya	647,298,080	0	647,298,080
Akumulasi Penyusutan		97,312,369,123	70,160,999,653	27,151,369,470

Dana yang

dibatasi

penggunaannya

Rp1.060.878.000

C.22 Dana yang dibatasi penggunaannya

Terdapat dana yang dibatasi penggunaannya yang merupakan pembayaran BBM berdasarkan kontrak nomor Nomor 1/PPK.STA.4/I/2024 Tahap 11 senilai Rp1.060.878.000,00. Adapun SPP dan SPM Penampung serta SPP dan SPM Pembayaran yaitu:

- SPP dan SPM Penampungan diterbitkan tanggal 23 Desember 2024 merupakan pembayaran BBM yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. Pertamina Patra Niaga senilai Rp1.060.878.000,00.
- SPP dan SPM Pembayaran diterbitkan tanggal 3 Januari 2025 merupakan pembayaran BBM yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. Pertamina Patra Niaga senilai Rp1.060.878.000,00

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.23 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.24 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp.187.851.098.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.25 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi tersebut berasal dari akumulasi aset tak berwujud dan aset lain – lain.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.124.607.360*

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.124.607.360 dan Rp244.494.885. Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- Belanja daya dan jasa sebesar Rp39.835.574 yaitu:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Belanja langganan telepon bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp866.241,
- Belanja langganan internet bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.147.574, dan
- Belanja langganan listrik bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.821.759.
- Belanja pegawai di tahun anggaran 2024 yang dibayarkan di tahun anggaran 2025 sebesar Rp23.893.786 yaitu:
 - Belanja gaji pokok PNS 2 orang pegawai sebesar Rp3.343.200,
 - Belanja tunjangan fungsional 1 orang pegawai sebesar Rp130.000,
 - Belanja tunjangan suami/istri 1 orang pegawai sebesar Rp94.720,
 - Belanja tunjangan anak PNS 1 orang pegawai sebesar Rp37.888,
 - Belanja pegawai (tunjangan kinerja) PNS untuk 3 orang pegawai sebesar Rp11.097.678, dan
 - Belanja pegawai tunjangan kinerja PPPK untuk 2 orang pegawai sebesar Rp9.190.300.
- Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp1.060.878.000 yang merupakan belanja BBM kapal pengawas yang telah selesai pekerjaannya tanggal 23 Desember 2024 melalui BAPP.910/PPK.Sta.4/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan BAST.955/PPK.Sta.4/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 namun pembayarannya dilaksanakan di tahun anggaran 2025 dan telah dibuatkan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) melalui

SPM 01327/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan SP2D nomor 240420301000346 tanggal 27 Desember 2024.

Utang yang belum Diterima Tagihannya Rp0

C.28 Utang yang belum diterima tagihannya

Tidak terdapat utang yang belum diterima tagihannya pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.29 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Ekuitas Rp39.721.512.356

C.32 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.721.512.356 dan Rp41.153.798.446. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp320*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp320 dan Rp0. Nilai tersebut diperoleh dari setoran jasa giro Rekening Penampung Lainnya (RPL) milik Kapal Pengawas Hiu 11 yang dibayarkan melalui NTPN F48BD55DF96LUUO6 dan NTB 000000296875 tanggal 29 Maret 2024.

*Beban Pegawai
Rp12.100.142.192*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.100.142.192 dan Rp10.303.462.697. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	4,516,896,100	3,710,829,120	21.72
Beban Pembulatan Gaji	74,125	63,971	15.87
Beban Tunjangan-Tunjangan	6,807,692,967	5,704,107,606	19.35
Beban Uang Makan	427,679,000	428,768,000	- 0.25
Beban Lembur	347,800,000	459,694,000	- 24.34
Jumlah Beban Pegawai (LO)	12,100,142,192	10,303,462,697	17.44
Belanja Pegawai Tahun yang Lalu			#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	926,514	9,281,522	- 90.02
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	(23,893,786)		#DIV/0!
Jumlah Beban Pegawai (Neraca)	12,077,174,920	10,312,744,219	17.11

Terdapat selisih antara beban pegawai di neraca dengan beban pegawai di LO sebesar (Rp22.967.272) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp1.514 dengan rincian:
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp928 melalui SPM nomor 00121T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421305000531 tanggal 8 Maret 2024.
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp482 melalui SPM nomor 00122T/440847/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001680 tanggal 8 Maret 2024.
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp72 melalui SPM nomor 00143T/440847/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421302001928 tanggal 15 Maret 2024.
 - Pengembalian pembulatan gaji sebesar Rp32 melalui SPM nomor 01165T/440847/2024 tanggal 18 November 2024 dan SP2D nomor 240421305003584 tanggal 15 November 2024.
- Pengembalian tunjangan umum sebesar Rp925.000 dengan rincian:
 - Pengembalian Belanja Kelebihan Bayar Tunjangan Umum PNS Bulan Januari - April Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najoran, A.Md sebesar Rp740.000 melalui NTPN 9BE495229QIJCD7A dan NTB 000000092085 tanggal 8 Mei 2024.
 - Pengembalian Kelebihan Belanja Tunjangan Umum Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 a/n Lucky Michael Najoran, A.Md sebesar Rp185.000 melalui NTPN

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

476D11GCAGAQVRP5 dan NTB 496815959821 tanggal 14 Mei 2024.

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar (Rp23.893.786) dengan rincian:
- Belanja gaji pokok PNS 2 orang pegawai sebesar Rp3.343.200,
 - Belanja tunjangan fungsional 1 orang pegawai sebesar Rp130.000,
 - Belanja tunjangan suami/istri 1 orang pegawai sebesar Rp94.720,
 - Belanja tunjangan anak PNS 1 orang pegawai sebesar Rp37.888,
 - Belanja pegawai (tunjangan kinerja) PNS untuk 3 orang pegawai sebesar Rp11.097.678, dan
 - Belanja pegawai tunjangan kinerja PPPK untuk 2 orang pegawai sebesar Rp9.190.300.

Beban

Persediaan

Rp220.149.822

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp220.149.822 dan Rp359.214.011. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	220,149,822	359,214,011	(38.71)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	220,149,822	359,214,011	(38.71)

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

*Beban Barang
dan Jasa
Rp16.125.720.001*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.125.720.001 dan Rp28.811.760.351. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,377,076,231	2,448,736,369	-43.76
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	279,998,821	246,711,729	13.49
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,054,700	8,041,000	49.92
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89,304,000	152,580,000	-41.47
Beban Bahan	10,791,725,358	23,073,075,813	-53.23
Beban Honor Output Kegiatan	27,100,000	38,060,000	-28.80
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,431,473,517	1,662,534,450	46.25
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	83,294,050	66,800,000	24.69
Beban Langganan Daya dan Jasa	720,761,824	736,109,990	-2.09
Beban Jasa Konsultan		11,690,000	
Beban Sewa	121,200,000	128,400,000	-5.61
Beban Jasa Profesi	32,100,000	25,300,000	26.88
Beban Jasa Lainnya	159,631,500	213,721,000	-25.31
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO)	16,125,720,001	28,811,760,351	-44.03
Pembayaran Beban Tahun Lalu	56,643,787	35,847,138	58.01
Pengembalian Belanja	8,061,700		
Ralat SPM		14,568,750	-100.00
Belanja barang yang masih harus dibayar	(39,835,574)	(56,643,787)	-29.67
Jumlah Beban Barang dan Jasa (NERACA)	16,150,589,914	28,805,532,452	-43.93

Terdapat selisih antara beban di LO dengan di Neraca sebesar (Rp24.869.913) yang merupakan:

- Tagihan daya dan jasa bulan Desember 2023 yang dibayarkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp56.643.787 yang terdiri dari:
 - Belanja langganan listrik sebesar Rp34.902.405 yang dibayarkan melalui SPM 00014T/440847/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp27.666.452 nomor

SP2D 240421304000057 tanggal 17 Januari 2024 dan SPM 00071T/440847/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan SP2D nomor 240421303000286 sebesar Rp7.235.953, serta

- Belanja langganan telepon Rp21.741.382 yang dibayarkan melalui SPM 00007T/440847/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan SP2D nomor 240421302000078 sebesar Rp16.796.090 dan SPM 00071T/440847/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan SP2D nomor 240421303000286 sebesar Rp4.945.292.
- Pengembalian belanja sebesar Rp8.061.700 berupa:
 - Pengembalian belanja melalui NTPN D42532CPQCRQDGPF tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp390.450 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat RIB Tahap I.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 6F86F397A7E6QGOP tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 037 Tahap II.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 1B7B76QT9HNOEGM0 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp883.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 003 Tahap III.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN A23FF5UFPN5C1GOB tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp836.000 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 037 Tahap I.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 0B0B1397A7E6QGLL tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 003 Tahap II.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Pengembalian belanja melalui NTPN 699392CPQCRQDGVT tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp655.500 berupa Pengembaian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap IV.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN EC6065UFPN5C1GV1 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp655.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap I.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 311395UFPN5C1GJJ tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 003 Tahap I.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 3FE0545KQ20J7GVN tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp655.500 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap III.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 139D01GCAI9E0GVC tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp660.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 8 M TB. 01 Tahap II.
 - Pengembalian belanja melalui NTPN 868C57NAPCA4RGR3 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp831.250 berupa Pengembalian belanja uang delegasi Speedboat 12 M Napoleon 037 Tahap III.
- Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp(39.835.574) berupa:
- Belanja langganan telepon bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp866.241,
 - Belanja langganan internet bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.147.574, dan

- Belanja langganan listrik bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.821.759

Beban

Pemeliharaan

Rp6.522.392.242

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp6.522.392.242 dan Rp3.621.170.232. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574,042,450	374,371,762	34.78
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,075,946,582	2,424,771,230	52.23
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	294,694,683	253,818,428	13.87
Beban Pemeliharaan Jaringan	69,262,550	66,388,000	4.15
Beban Persediaan Suku Cadang	508,445,977	501,820,812	1.30
Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)	6,522,392,242	3,621,170,232	80.12
Utang yang belum ditagihkan			
Utang kepada pihak ketiga			
Jumlah Beban Pemeliharaan (NERACA)	6,522,392,242	3,621,170,232	80.12

Pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat beban persediaan suku cadang yang diperoleh dari pemakaian suku cadang untuk Kapal Pengawas Hiu 11, Kapal Pengawas Hiu Macan 01, Speedboat TB 01, Speedboat Napoleon 003, Speedboat Napoleon 037, Speedboat Napoleon 038, dan Rigid Inflatable Boat (RIB).

Beban Perjalanan

Dinas

Rp3.488.434.132

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.488.434.132 dan Rp2.569.508.089. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2,821,908,036	2,131,259,972	24.47
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	199,240,000	162,600,000	18.39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108,500,000	112,498,000	-3.68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	358,786,096	163,150,117	54.53
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)	3,488,434,132	2,569,508,089	26.34
Pengembalian belanja	812,000	1,298,800	-59.95
Utang yang belum ditagihkan			#DIV/0!
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (NERACA)	3,489,246,132	2,570,806,889	26.32

Terdapat selisih beban perjalanan dinas di LO dan Neraca sebesar Rp812.000 berupa:

- Pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp500.000 melalui NTPN 8B0B35UFPN2VNGD8 tanggal 16 Juli 2024.
- Pengembalian sebesar Rp312.000 melalui NTPN F8B255UFPROTEEFH tanggal 19 Desember 2024.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp3.721.932.618*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.721.932.618 dan Rp3.765.433.877. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,855,314,792	2,799,188,361	1.97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	301,790,523	282,491,645	6.39
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	564,827,303	683,707,204	- 21.05
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	46,667	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,721,932,618	3,765,433,877	- 1.17

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp48.230.568)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Nilai kegiatan non operasional sebesar (Rp48.230.568) diperoleh dari:

- a. Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp9.318.828 yang diperoleh dari Pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya melalui:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.117.128 dengan NTPN 34D211JNFUN2DG2B dan NTB 447935668768

tanggal 26 Januari 2024 melalui risalah lelang nomor 56/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024.

- Penjualan alat rumah tangga dan perabot kantor melalui risalah lelang nomor 59/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024 yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2024 dengan NTPN 3515348VVEDUSNPK dan NTB 064567978302 sebesar Rp201.700.
- b. Beban pelepasan aset sebesar Rp24.737.944 berupa:
- Penghapusan 226 NUP dengan nilai buku Rp9.737.944 dengan usulan penghapusan nomor B.2536/PSDKPSta.4/PL.750/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dan
 - Penghapusan 7 NUP Konstruksi Dalam Pembangunan dengan tahun perolehan 2020 melalui SK Penghapusan BMN nomor 1282/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan nilai buku 15.000.000 dengan rincian:
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 124 sebesar Rp2.000.000,
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 125 sebesar Rp2.000.000,
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 126 sebesar Rp2.000.000,
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 127 sebesar Rp2.000.000,
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 128 sebesar Rp2.000.000,
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 129 sebesar Rp2.500.000, dan
 - Perencanaan rehab mes operator NUP 125 sebesar Rp2.500.000.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- c. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp48 yang diperoleh dari:
- Pembulatan gaji sebesar Rp30 melalui SPM nomor 00168T/440847/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan SP2D nomor 240421305000662 tanggal 20 Maret 2024.
 - Pembulatan gaji sebesar Rp18 melalui SPM nomor 00022T/440847/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan SP2D nomor 240421302000187 tanggal 22 Januari 2024.
- d. Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp32.811.500) berupa pemusnahan persediaan melalui Berita Acara nomor 831/PSDKPSta.4/PL.750/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9,318,828	5,103,373	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	24,737,944	19,067,133	
Jumlah Pelepasan Aset Non Lancar	(15,419,116)	(13,963,760)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	48	4,865,100	
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu		0	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	48	4,865,100	-100.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	32,811,500	0	#DIV/0!
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(48,230,568)	(9,098,660)	430.08

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024
Rp0 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp41.153.798.446

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.153.798.446 dan Rp44.614.211.942.

Defisit LO
(Rp42.227.001.255)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp42.227.001.255) dan (Rp49.439.657.167). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 31 Desember 2024 dan 2023.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya. Barang yang dilakukan reklasifikasi semula berupa aset

tetap peralatan dan mesin setelah dilakukan inventarisasi dapat disimpulkan bahwa BMN tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai aset tetap sebab tergolong barang habis pakai yang telah digunakan sejak BMN tersebut diperoleh, dengan nilai perolehan <Rp1.000.000. Koreksi reklasifikasi periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp120.169.146.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
(Rp169.247.805)*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan aset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp169.247.805) dan Rp365.297.917. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi tersebut berupa akumulasi penyusutan dari reklasifikasi aset yang dilakukan pada modul aset melalui surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor 703/PSDKPSta.4/PL.760/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang disebabkan oleh adanya kesalahan kodefikasi dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

No	Uraian	Nilai
1	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
2	Reklasifikasi Masuk Mesin Pompa air PMK	178,875
3	Reklasifikasi Masuk Mesin Pompa air PMK	74,250
4	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
5	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
6	Reklasifikasi Masuk Water Filter	157,261,500
7	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
8	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
9	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
10	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
11	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
12	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
13	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1,173,318
Total		169,247,805

Koreksi Lain-lain **E.3.5 Koreksi Lain-lain**

Rp19.438

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp19.438 dan Rp2.027.412. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Nilai tersebut merupakan pajak 0,5% dari nilai tunjangan yang belum dibayarkan. Nilai piutang tidak tertagih sebesar Rp10.188 yang diperoleh dari piutang tunjangan kinerja tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp2.037.600 dan piutang tak tertagih sebesar Rp9.250 yang diperoleh dari piutang tunjangan umum tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp1.850.000.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp40.963.943.532

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.963.943.532 dan Rp45.491.749.196. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih

entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(13,206,796)
Ditagihkan ke Entitas Lain	40,969,821,578
Transfer Masuk	7,328,750
Transfer Keluar	-
Jumlah	40,963,943,532

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 dan 2023, DDEL sebesar (Rp13.206.796) dan (Rp9.968.473), sedangkan DKEL sebesar Rp40.969.821.578 dan Rp45.742.062.669.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp7.328.750 dan Rp0. Transfer masuk tersebut diperoleh dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa melalui BAST nomor B.5362/SJ.6/PL.450/IX/2024 tanggal 25 September 2024 sebesar Rp361.318.060 yang terdiri dari:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

Uraian	Unit	Nilai
Lemari Kayu	28	172,150,420
Laci Box	13	18,733,000
Meja Kerja Kayu	15	38,520,000
Kursi Besi/Metal	40	77,706,000
Kursi Kayu	8	36,608,000
Meja Rapat	2	8,950,640
Nakas	1	950,000
Meubelair Lainnya	2	7,700,000
Total	109	361,318,060

Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang tercantum ke dalam neraca sebesar Rp7.328.750, hal tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp353.989.310.

Ekuitas Akhir
Rp39.721.512.356

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.721.512.356 dan Rp41.153.798.446.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2024 pada Stasiun PSDKP Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.1/Sta.4/KU.611/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yaitu:
 - PPK : Eko Iswahyudi, S. Pi
 - PPSPM : Rachmat Muharyakinsyah, A.Md
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Amil Maulana sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

KEP.2/PSDKPSta.4/KU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

2. Pelaksanaan revisi sampai dengan 31 Desember sebanyak 14 (empat belas) kali dengan *digital stamp* DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November 2023 dengan nomor digital stamp 2873-4272-0545-5000 yaitu:
 - Revisi ke 1 tanggal 25 Januari 2024 dengan digital stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global melalui automatic adjustment (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000.
 - Revisi ke 2 tanggal 7 Februari 2024 dengan Digital Stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
 - Revisi ke 3 tanggal 22 April 2024 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:2084-0506-0580-7385 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowering Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar

Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.

- Revisi ke 4 tanggal 1 Mei 2024 yang merupakan revisi DJA dengan DS:2143-7527-3625-8851 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000.
- Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2024 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
- Revisi ke 6 tanggal 9 Juli 2024 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena terdapat beberapa anggaran yang kurang dari realisasi untuk dibayarkan di bulan selanjutnya.
- Revisi ke 7 tanggal 8 Agustus 2024 dengan digital stamp DS:6536-2961-2214-0040 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL berupa Pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000. Pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu

Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.

- Revisi ke 8 tanggal 4 September 2024 dengan digital stamp DS:8204-3609-4086-0080 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL berupa Pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) sebesar Rp9.991.000 yang dipergunakan untuk pembangunan garasi motor Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp20.000.000, pergeseran anggaran dalam satu RO Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP, pergeseran anggaran dalam satu RO Armada Pengawasan SDKP yang dirawat yang semula dipergunakan untuk repowering Auxiliary Engine KP. HMC 01 menjadi penambahan darurat Kapal Pengawas sebesar Rp184.440.000, pergeseran anggaran antar RO yaitu dari RO unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak (2352.QIC.002) sebesar Rp5.360.000 ke Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (2352.QIC.001) yang dipergunakan untuk kegiatan operasional.
- Revisi 9 tanggal 15 Oktober 2024 dengan digital stamp DS:0340-7084-1808-7079 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001), dan pergeseran anggaran belanja pegawai oleh karena terdapat pagu minus di beberapa detail belanja pegawai.
- Revisi 10 tanggal 5 November 2024 dengan digital stamp DS:8145-5650-8193-0350 yang merupakan revisi

kewenangan DJA berupa buka blokir anggaran sebesar Rp1.821.777.000 dengan rincian:

- Operasional kapal pengawas melalui penambahan hari operasi sebanyak 6 hari operasi dengan anggaran sebesar Rp1.258.777.000 (termasuk didalamnya berupa penambahan belanja bahan bakar minyak, uang delegasi, ongkos angkut dan pelumas).
- Armada yang dirawat sebesar Rp563.000.000 yang akan dipergunakan untuk (pembelian Radar, perbaikan komponen kelistrikan (HCU dan PCU) pada KP. Hiu 11).
- Revisi 11 tanggal 17 November 2024 dengan digital stamp DS:3906-0485-4297-5240 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPb yang merupakan revisi selfblocking pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri sebanyak Rp200.000.000.
- Revisi 12 tanggal 20 November 2024 dengan digital stamp DS:0907-3797-0852-1999 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPb berupa penambahan volume output pada RO Layanan BMN (2355.EBA.956) semula 1 layanan menjadi 4 layanan, dan penambahan anggaran belanja gaji untuk memenuhi pagu minus pada beberapa detil belanja pegawai.
- Revisi 13 tanggal 11 Desember 2024 dengan digital stamp DS:8976-9610-6043-2936 yang merupakan revisi kewenangan DJA berupa volume output beserta anggaran Penanganan Perkara semula 7 kasus menjadi 3 kasus dan pergeseran anggaran antar UPT sebesar Rp322.000.000 yaitu ke UPT Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp272.000.000 berupa anggaran penanganan perkara dan ke UPT Pangkalan PSDKP Batam berupa

anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp50.000.000.

- Revisi 14 tanggal 27 Desember 2024 dengan digital stamp DS:8976-9610-6043-2936 berupa pemutakhiran revisi KPA dan pergeseran anggaran belanja gaji pegawai.
3. Pada Tahun anggaran 2024 terdapat saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yaitu:

- RPATA Tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024. SPM penampungan RPATA diterbitkan di TA 2023 dengan nomor SPM 00825T/440847/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan SP2D nomor 230420301000253 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp187.851.098 yang merupakan belanja pemeliharaan jalan lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak yang telah selesai pekerjaannya tanggal 27 Desember 2023 melalui BAST nomor BAST.351/PPK.Sta.4/XII/2023 yang pembayarannya dilaksanakan di tahun anggaran 2024 melalui SPM nomor 00005T/440847/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan SP2D nomor 249991305000007 tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp187.851.098.
- RPATA Tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025, dengan SPM penampungan RPATA diterbitkan di TA 2024 dengan nomor 01327T/440847/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan nomor SP2D 240420301000346 tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp1.060.878.000.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 01 nomor 316/Sta.4-HMC.01/PW.430/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sisa Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

19.200 liter, dan BA nomor 275/Sta.4-HMC.01/PW.430/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sisa minyak pelumas M/E, A/E, Gearbox sebanyak 350 liter, dan minyak pelumas hidrolik sebanyak 72 liter. Sedangkan berdasarkan berita acara sisa BBM Kapal Pengawas Hiu 11 nomor 994/Sta.4-HIU11/PW.431/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 12.300 liter.

Nama Kapal	Bulan	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu 11	Januari	10,170	-	2,940	7,230
	Februari	7,230	5,000	2,980	9,250
	Maret	9,250	14,000	22,470	780
	April	780	22,000	13,850	8,930
	Mei	8,930	31,000	34,310	5,620
	Juni	5,620	5,000	5,720	4,900
	Juli	4,900	-	4,090	810
	Agustus	810	18,000	12,380	6,430
	September	6,430	-	-	6,430
	Oktober	6,430	25,000	21,730	9,700
	November	9,700	6,000	14,350	1,350
	Desember	1,350	36,000	25,050	12,300
KP. Hiu Macan 01	Januari	28,440	25,000	38,340	15,100
	Februari	15,100	-	4,100	11,000
	Maret	11,000	20,000	20,000	11,000
	April	11,000	28,000	12,500	26,500
	Mei	26,500	-	11,000	15,500
	Juni	15,500	-	10,900	4,600
	Juli	4,600	12,000	12,700	3,900
	Agustus	3,900	34,000	25,600	12,300
	September	12,300	-	-	12,300
	Oktober	12,300	62,000	58,700	15,600
	November	15,600	44,000	36,100	23,500
	Desember	23,500	53,500	57,800	19,200

Sisa minyak pelumas M/E dan A/E sebanyak 257 liter, minyak pelumas gear box sebanyak 75 liter, dan minyak pelumas oli hidrolik sebanyak 20 liter melalui BA nomor 996/Sta.4-HIU11/PW.431/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Pagu anggaran BBM Kapal Pengawas sebesar

Rp9.229.028.000 yang kemudian di addendum menjadi Rp7.967.768.000 dan di addendum lagi menjadi Rp9.225.502.000 dengan nilai realisasi BBM sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.225.502.000 sebanyak 441 KL, dengan rincian BBM Hiu Macan 01 sebesar Rp5.491.459.000 dengan BBM sebanyak 266,5 KL dan BBM Hiu 11 sebesar Rp3.734.043.000 dengan BBM sebanyak 174 KL.

5. Sampai dengan akhir tahun 2024 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp9.318.828 dengan rincian:

- Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.117.128 dengan NTPN 34D211JNFUN2DG2B dan NTB 447935668768 tanggal 26 Januari 2024 melalui risalah lelang nomor 56/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024.
- Penjualan alat rumah tangga dan perabot kantor melalui risalah lelang nomor 59/11.01/2024-01 tanggal 17 Januari 2024 yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2024 dengan NTPN 3515348VVEDUSNPK dan NTB 064567978302 sebesar Rp201.700.

6. Terdapat temuan BPK yang telah dibayarkan pada tahun anggaran 2024 berupa pembayaran tunjangan umum dan tunjangan kinerja kepada pegawai tugas belajar atas nama Lucky Michael Najooan yang dilaksanakan tanggal 21 September 2022 sd 20 September 2024 dengan nomor SK 20/KEPMEN/KP.532/III/2023, dimana seharusnya dilakukan penghentian pembayaran tunjangan umum terhitung mulai bulan ketujuh yaitu April 2023 sesuai dengan tertera dalam SK tersebut. Sedangkan untuk tunjangan kinerja yang dibayarkan pada kelas jabatan 8 yang seharusnya dibayarkan pada kelas jabatan 7 sejak

yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembalian belanja pegawai tersebut akan dilakukan pada tahun 2024, dengan rician pengembalian sebagai berikut:

- a. Pengembalian Tunjangan Umum sebesar Rp1.850.000 dari bulan April sampai dengan Desember 2023 serta Tunjangan Umum Hari Raya Tahun 2023 yang dibayarkan melalui NTPN 3307055DF9BQ836I dan NTB 00000095085 tanggal 8 Mei 2024
 - b. Pengembalian Tunjangan Kinerja sebesar Rp2.037.600 dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan melalui NTPN 5227A48VVEPDR0BQ dan NTB 00000098753 tanggal 8 Mei 2024.
7. Sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung IMB tersebut telah berubah menjadi SLF (Surat Laik Fungsi) yaitu seluruh bangunan yang berada di Pontianak dan Wilker PSDKP Ketapang. Untuk SLF Kantor Wilker PSDKP Ketapang sampai dengan pelaporan telah berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ketapang dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan SLF. Sedangkan untuk Kantor Pontianak batas tanah secara digital dari BPN tidak sesuai eksistingnya yang terbit di dalam sertifikat tanah Kantor Stasiun PSDKP Pontianak,

sehingga permasalahan tersebut sedang diajukan oleh Biro Hukum KKP ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

8. Sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI lingkup Ditjen PSDKP Nomor 1092/PSDKP.1/TU.210/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, yakni terkait temuan BPK RI atas LK KKP periode TA 2010 – 2021 yakni BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan KPB terkait supaya menginput bukti kepemilikan yang sah atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, pada Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 65 NUP senilai Rp56.647.948.442 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 64 NUP senilai Rp56.587.948.422 sehingga sampai dengan tanggal pelaporan masih tersisa sebanyak 1 NUP senilai Rp60.000.000 berupa speedboat/motor tempel yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 yang masih belum ditindak lanjuti. Hal tersebut disebabkan motor tempel tersebut merupakan bagian dari sekoci yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah dari mesin tempel tersebut.
9. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat jaminan pemeliharaan yaitu:
 - Jaminan Pemeliharaan melalui nomor jaminan 23.93.01.2990.10.24 yang berlaku dari tanggal 6 September 2024 sampai dengan 4 Maret 2025 (selama 180 hari kalender) melalui pekerjaan Pembangunan Garasi Speedboat Satwas Kayong Utara oleh CV. Lestari yang dikeluarkan oleh Videi General Insurance dengan nilai jaminan sebesar Rp13.895.000.

- Garansi Bank sebagai jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor BG61224326894 yang berlaku selama 180 hari kalender dari tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan 11 Juni 2025 atas pekerjaan Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak oleh CV. Mitra Utama Abadi dengan nilai jaminan sebesar Rp59.800.000.
10. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat renovasi gedung dan bangunan seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan (533111) dan menjadi aset yang menambah nilai aset gedung dan bangunan, namun menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) sehingga belum tercatat menambah nilai bangunan gedung kantor permanen (NUP 13) di dalam neraca aset. Bangunan tersebut berupa Pemeliharaan Ruang Aula Kantor Stasiun PSDKP Pontianak dengan nomor kontrak SPK.458/PPK.Sta.4/IX/2024 tanggal 30 September 2024 sebesar Rp184.824.482. Koreksi perubahan nilai bertambah akan dilakukan pada TA 2025.
11. Rekening yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Pontianak di BNI yaitu:
- Bendahara Pengeluaran Stasiun PSDKP Pontianak dengan nomor 9890954408471000,
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu Satwas SDKP Sambas dengan nomor 890954408471001,
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu Satwas SDKP Kotawaringin Barat dengan nomor 890954408471002,

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK AUDITED 2024

- Bendahara Pengeluaran Pembantu Satwas SDKP Kayong Utara dengan nomor 9890954408471003,
- Rekening Penampungan Lainnya yang digunakan oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dengan nomor 6699800087, dan
- Rekening Penampungan Lainnya yang digunakan oleh Kapal Pengawas Hiu 11 dengan nomor 6699600066.

12. Aset yang telah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaannya adalah sebagai berikut:

Uraian Aset	Total Aset	Nilai Aset Yang Sudah ada SK PSP	Aset yang sedang dalam Proses PSP	Aset Tetap yang belum di PSP
Tanah	11,836,746,000	11,836,746,000	0	0
Peralatan dan Mesin	60,264,230,048	59,986,366,598	61,700,000	216,163,450
Gedung dan Bangunan	14,402,001,836	12,472,114,103	1,592,690,483	337,197,250
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,153,264,709	22,153,264,709	0	0